

DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Syawal Zakaria¹⁾, Ohorella Hasna²⁾

^{1),2)} Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan apakah desentralisasi fiskal bisa mengurangi ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mendeteksi variabel lain (pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat investasi) yang dijadikan sebagai variabel kontrol yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional.

Hasil estimasi dengan menggunakan data panel pada 16 provinsi selama tahun 2001-2010 di Kawasan Timur Indonesia, mengkonfirmasi bahwa (1) desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; (2)

desentralisasi fiskal tidak mampu mengurangi ketimpangan regional.

Disamping itu, penelitian ini juga menemukan pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah, tingkat investasi memiliki efek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Selain itu, dalam jangka panjang kinerja perekonomian cenderung lebih baik di Kawasan Timur Indonesia akibat dari adanya perubahan struktur perekonomian dari pola perekonomian tradisional ke pola perekonomian modern. Keadaan ini tercermin dari pembuktian hipotesis U-terbalik Kuznets.

Kata Kunci : *Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Regional dan Hipotesis U-terbalik Kuznet .*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan terutama menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran atau belanja daerah (Ananda, 2010).

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, minimal memiliki tiga tujuan utama yaitu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, menyediakan layanan publik yang lebih efisien, dan lebih mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dicerminkan oleh adanya alokasi dana desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Namun demikian, secara empirik, studi yang dilakukan pada beberapa negara tentang hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional berbeda-beda. Akai, Sakata (2002), Stansel (2005), Zhang dan Zou (2001) serta TieBen (2003) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Davoodi, dan Zou (1998), Woller dan Phillips (1998), Jin dan Zou (2005) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek negatif yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Rodroguez-Pose dan Ezcurra (2010) menemukan bahwa desentralisasi fiskal bisa berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, efek desentralisasi fiskal juga berhubungan dengan ketimpangan regional. Akai, Sakata (2005) dan Widyanto (2008), menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang bisa mengurangi ketimpangan regional. Sedangkan Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2009), menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan regional di negara maju, tetapi di negara-negara berkembang justru semakin meningkatkan ketimpangan regional. Zou (2009) juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal mengalami kegagalan dalam menciptakan pemerataan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan otonomisasi dan desentralisasi fiskal di Kawasan Timur Indonesia sudah dimulai tahun 2001. merupakan suatu proses transformasi menuju terbentuknya keseimbangan, yakni antara dampak positif dan negatif yang muncul sebagai akibat dari proses tersebut. Implikasi positif adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari perkembangan PDRB, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat lebih sejahtera. Meskipun secara makro kebijakan

desentralisasi fiskal menunjukkan dampak positif, tetapi secara regional ada sebagian provinsi justru memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut (Rahmawati, 2008:39), yang ditandai dengan kinerja perekonomian relatif rendah dan masih tingginya kesenjangan antar regional yakni antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangatlah relevan jika penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia menjadi isu utama studi ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sering didefinisikan sebagai pendelegasian otoritas fiskal dari pihak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal bisa memberikan efisiensi ekonomi yang besar dalam alokasi sumber daya di sektor publik. Dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut akan menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prud'home (1995) bahwa preferensi individu dan mobilitas individu berbeda antara daerah, maka sistem desentralisasi bisa menjadi lebih efisien. Sebaliknya, jika preferensi individu sama, maka keseragaman penyediaan layanan publik lebih efisien. Prud'home (1995) juga berpendapat bahwa meskipun masyarakat yang tinggal pada wilayah memiliki kemiripan preferensi atau jika kurangnya mobilitas daerah, pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam penyediaan layanan barang publik daripada pemerintah pusat.

Oates (1993) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal bisa meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan pembiayaan daerah. Efisiensi ekonomi ini menginduksi penduduk untuk bergerak dan hidup di wilayah dan komunitas yang memuaskan preferensi mereka. Desentralisasi meningkatkan kesejahteraan bersama melebihi yang dihasilkan seperti penyediaan layanan publik daripada dibawah sistem pemerintahan yang sentralistik. Tingkat efisiensi yang dihasilkan cukup bervariasi antar daerah akibat dari perbedaan preferensi dan pembiayaan.

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Banyak penelitian tentang desentralisasi fiskal yang telah dilakukan pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Tarigan (2003), melakukan penelitian di 34 negara selama tahun 1979-1999 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan GDP riil per kapita, dengan suatu kesimpulan desentralisasi fiskal menciptakan ketidakefisienan pelayanan publik. Baskaran dan Feld (2009), berpendapat bahwa desentralisasi fiskal tidak memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa bukti bahwa pengawasan sub-federal atas pajak bersama memicu pertumbuhan ekonomi lebih ekonomis.

Sementara itu, Wibowo (2008), menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect*, hasil temuannya bahwa desentralisasi secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999 – 2004. Hasil ini sekaligus memperkuat teori bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993).

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional

Bonet (2006), meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Kolombia. Dengan menggunakan panel data set antar-departemen, ditemukan bukti kuat bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan daerah. Perilaku ini disebabkan oleh satu set faktor yakni pengeluaran saat ini yang sebagian

besar dialokasikan untuk sumber daya daerah baru (misalnya, upah dan gaji), bukan investasi modal atau infrastruktur, kurangnya komponent redistribusi transfer nasional, tidak adanya insentif yang memadai mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah untuk mempromosikan manfaat efisien dari mereka, dan kurangnya kapasitas kelembagaan di pemerintah daerah.

Hasil analisis empirik juga membuktikan bahwa unsur-unsur penting dari kebijakan desentralisasi fiskal yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah yaitu; sistem transfer yang adil, kemampuan menyeleksi sektor, dimana sumber daya dialokasikan, dan penerapan insentif secara benar. Unsur-unsur tersebut, memainkan peran penting dalam menukseskan desentralisasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan daerah. Menurut Bonet (2006), ada dua variabel yang perlu dikontrol; tingkat keterbukaan ekonomi dan kecenderungan aglomerasi ekonomi, memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan regional.

Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2010), penelitian ini menganalisis hubungan antara desentralisasi dan ketimpangan regional di negara-negara di negara maju dan berkembang. Hasil penelitian membuktikan bahwa di negara maju desentralisasi politik tidak mempengaruhi evolusi ketimpangan antar daerah, sedangkan desentralisasi fiskal memberikan kontribusi mengurangi kesenjangan daerah. Sebaliknya, di negara-negara sedang berkembang desentralisasi fiskal memicu kenaikan ketimpangan daerah.

Akai dan Sakata (2005), meneliti tentang desentralisasi fiskal, komitmen dan ketimpangan regional. Dengan menggunakan data cross-sectional Amerika Serikat, termasuk konvergensi pendapatan daerah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan regional. Arah hubungan tersebut, tergantung pada bagaimana desentralisasi fiskal dipromosikan.

Kerangka Konsep Penelitian

Ada dua isu yang saling terkait dengan desentralisasi fiskal. Pertama, berhubungan dengan pembagian tanggungjawab dan sumber pendapatan antar tingkatan (nasional, regional, atau daerah). Kedua, jumlah kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menentukan biaya dan pendapatan (Davey, 2003).

Karena itu kombinasi dari kedua dimensi tersebut, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi baik secara politik, administrasi maupun ekonomi. Ini berarti kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah secara substansi tergantung pada; (1) jenis pembiayaan publik; (2) pertanggungjawaban penerimaan; (3) pemilihan alokasi anggaran pelayanan individu; dan (4) penentuan tingkat beban pajak. Jika konsep tersebut dilaksanakan secara baik dan tepat, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional bisa dikurangi.

Disamping faktor penentu tersebut, faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan regional adalah faktor pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat investasi. Faktor-faktor ini, yang dalam penelitian ini disebutkan sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan kerangka konsep penelitian di atas, maka dapatlah dibangun kerangka fikir penelitian terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *positivist*. Menurut Neuman (2006: 82-83), pendekatan *positivist* adalah suatu metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan pengamatan empiris yang tepat dari perilaku individu atau kelompok untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari aktifitas manusia. Pendekatan *positivist* tersebut, selain menganalisis hubungan yang bersifat korelasi intependensi, koeksistensi dan sebab-akibat (*causality*), tetapi juga mampu menjelaskan kondisi yang terjadi dalam masyarakat (*explanatory capability*) dan melakukan prediksi tentang hal-hal yang dapat terjadi (*predictive capability*) tentang keterkaitan desentralisasi fiskal,

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Definisi dan pengukuran variabel dimaksudkan untuk menjelaskan variabel yang sedang diteliti. Dengan kata lain definisi variabel merupakan petunjuk pelaksanaan cara mengukur suatu variabel.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Oleh karena sumber data yang dikumpulkan memiliki sifat data *time series* dan *cross-section*, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data panel. Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross-section*. Dengan mengakomodasi variabel-variabel *cross-section* maupun *time series*, panel data mampu menurunkan omitted-variables karena model ini mengabaikan variabel yang relevan. Selain itu, dapat mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi (Nachrowi dan Usman, 2006).

Dalam estimasi *model* ekonometrika terdapat tiga teknik. Pertama, *Pool Least Square* (PLS), yakni suatu teknik estimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Teknik ini menggabungkan (*pool*) seluruh data *time series* dan *cross-section*. Kedua, *Fixed Effect Model* (FEM). Pendekatan model ini merupakan suatu teknik yang memperhitungkan model *dummy variable* karena ada kemungkinan terdapat masalah *omitted variables* sehingga berakibat pada perubahan *intercept time series* dan *cross-section*. Ketiga, *Random Effect Model* (REM). Teknik ini lebih menitikberatkan pada perbaikan efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross-section* dan *time series*. *Random Effect Model* adalah variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS).

$$= + +\alpha +\alpha +\alpha +\alpha +\alpha +$$

$$= + + () + + + +$$

$$+$$

HASIL PENELITIAN

Estimasi Hasil Penelitian

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Tabel 1 memperlihatkan hasil estimasi model pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan *random effect model* (REM) yang dilakukan secara panel atas 160 pengamatan di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, dapatlah diperoleh beberapa poin penting untuk menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. *Pertama*, dengan menggunakan teknik REM terhadap 160 observasi diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted, R²*) sebesar 0,7839. Ini artinya variabel desentralisasi fiskal (DF), pertumbuhan penduduk (PDDK), angka partisipasi sekolah (APS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat investasi (TI) dapat menjelaskan koefisien pertumbuhan ekonomi regional (PER) sebesar 78,39 persen, sedangkan sisanya sebesar 21,61 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel penjelas tersebut, juga dikonfirmasi oleh *F-statistic* sebesar 116,33 dengan probabilitas *F-statistic* pada derajat kepercayaan 99 persen atau α , 1 persen. *Kedua*, berdasarkan hasil uji *t-Statistic* untuk mendeteksi hubungan antar variabel baik desentralisasi fiskal (DF) sebagai variabel penjelas utama maupun variabel kontrol yang terdiri dari variabel pertumbuhan penduduk (PDDK), angka partisipasi sekolah (APS), serta tingkat investasi (TI) termasuk variabel konstanta (*intersep*) adalah positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 dan 5 persen. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. *Ketiga*, khusus untuk *random effect cross-section*, yang menggambarkan ciri atau karakteristik masing-masing daerah/provinsi, juga menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi aktual provinsi di Kawasan Timur Indonesia relatif baik dan bernilai positif.

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka secara statistik hipotesis penelitian pertama (H1) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia dapat dibuktikan kebenarannya.

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional

Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM) yang dilakukan secara panel atas 160 pengamatan di Kawasan Timur Indonesia.

Secara umum berdasarkan informasi pada tabel 2, dapat dikonfirmasi beberapa poin terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia. *Pertama*, dengan menggunakan teknik FEM terhadap 160 observasi diperoleh koefisien determinasi (*adjusted R²*), sebesar 0,9379. Ini artinya variabel desentralisasi fiskal (DF), pertumbuhan ekonomi (PER), pertumbuhan penduduk (PDDK), angka partisipasi sekolah (APS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat investasi (TI) dapat menjelaskan koefisien ketimpangan regional (KR) sebesar 93,79 persen, sedangkan sisanya 6,21 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel penjelas tersebut, juga dikonfirmasi oleh *F-statistic* sebesar 110,20 dengan probabilitas *F-statistic* pada derajat kepercayaan 99 persen atau α , 1 persen. *Kedua*, berdasarkan uji *t-Statistic* untuk mendeteksi hubungan antar variabel bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PER), dan tingkat investasi (TI) memiliki pengaruh secara signifikan yang bisa mengurangi ketimpangan regional. Kemudian variabel angka partisipasi sekolah (APS) adalah positif signifikan meningkatkan ketimpangan regional. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal (DF), pertumbuhan penduduk (PDDK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak cukup kuat untuk mengurangi ketimpangan regional. Ketiga, dilihat dari *fixed effect cross-section* yang menggambarkan kondisi ketimpangan masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia adalah bernilai negatif, kecuali provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur yang memiliki angka positif.

Berdasarkan informasi dan hasil estimasi di atas, maka secara statistik hipotesis penelitian kedua (H2) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena tidak mampu mengurangi ketimpangan regional.

PEMBAHASAN

Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah telah menjadi perhatian tersendiri oleh berbagai para ahli. Dasar pandangannya bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan daerah karena diharapkan bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi daerah sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat [(Oates 1993, 2007; Bird, 2000; Khusaini, 2006; Bahl, 2008; Yustika, 2008; dan Ananda, 2010)].

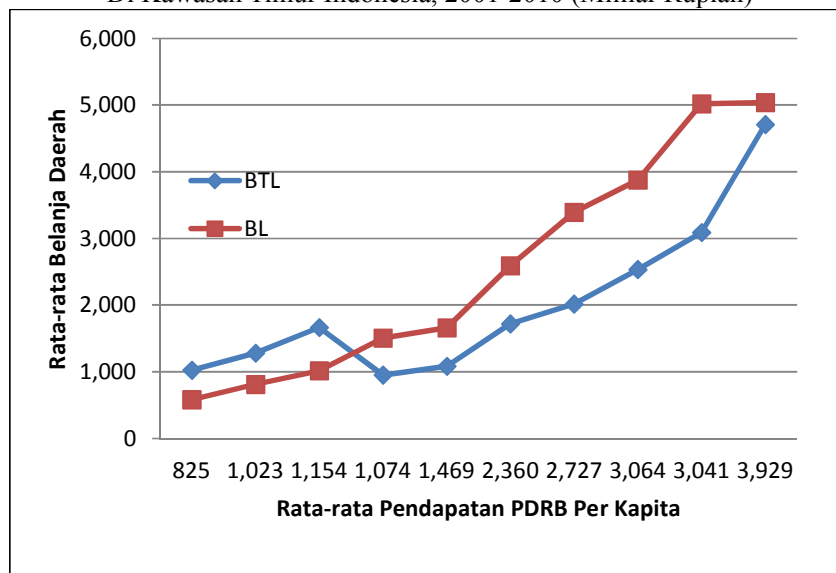
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien beta pada variabel desentralisasi fiskal adalah sebesar 3,68. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa ketika alokasi dana transfer yang dialokasikan melalui dana perimbangan (DP) ditambahkan, maka secara positif dan signifikan bisa memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen. Hal ini dikonfirmasi oleh aliran dana desentralisasi bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni 2001-2010, terus menunjukkan peningkatan, rata-rata per tahun 20,86 persen atau sebesar 9,84 triliun.

Peningkatan jumlah dana desentralisasi tersebut, semestinya juga dibarengi dengan peningkatan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi alokasi dana transfer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hanya sebesar nilai koefisien desentralisasi fiskal sebesar 3,68 persen atau setara dengan 0,36 persen (362,1 miliar per tahun) dari rata-rata dana

perimbangan (DP) yang dilalokasikan dalam APBD. Dengan jumlah dana desentralisasi tersebut, maka setiap daerah atau provinsi di Kawasan Timur Indonesia hanya memperoleh 0,06 persen atau 22,6 milyar rupiah per tahun untuk membiayai kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Ini artinya, hanya sebagian kecil alokasi dana APBD terserap untuk membiayai kegiatan pembangunan sektor riil, sedangkan sisanya sebesar 96,32 persen untuk belanja non sektor riil.

Seiring dengan kenaikan dana desentralisasi, telah memberikan efek pada peningkatan PDBR per kapita daerah rata-rata per tahun sebesar 21,40 persen selama kurun waktu sepuluh tahun. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan PDRB per kapita sebagai indikator kinerja perekonomian tersebut, lebih diakibatkan oleh belanja daerah tidak langsung (BTL) atau belanja daerah langsung (BL)? Gambar berikut menjelaskan hubungan antara BTL, BL dan PDRB per kapita.

Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan PDRB Per Kapita Di Kawasan Timur Indonesia, 2001-2010 (Milliar Rupiah)



Gambar di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2001-2010 belanja daerah terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk jenis belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL) dengan kenaikan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 22,44 persen dan 28,21 persen. Kenaikan BTL dan BL tersebut secara langsung mempengaruhi pergerakan PDRB per kapita. Sejuahmana kedua jenis belanja daerah tersebut, mempengaruhi pergerakan PDRB per kapita. Gambar di atas, juga mengkonfirmasi bahwa belanja tidak langsung (BTL) lebih elastis jika dibandingkan dengan belanja langsung (BL). Artinya bahwa perubahan atau peningkatan PDRB per kapita lebih banyak dipengaruhi oleh belanja tidak langsung (BTL) terutama pada belanja pegawai. Sementara belanja langsung (BL) yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi layanan publik relatif kurang memberikan pengaruh yang signifikan atau lebih bersifat inelastis.

Koefisien Variabel Kontrol dan Pertumbuhan Ekonomi Regional ***Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan ekonomi***

Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diawasi bisa menimbulkan masalah dalam pembangunan. Namun, pada daerah/wilayah di Kawasan Timur Indonesia bukan menjadi masalah yang serius. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dampak positif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia merupakan suatu wilayah di Indonesia memiliki potensi sumber daya ekonomi cukup besar yang belum dieksplorasi secara optimal. Hal ini tercermin dari luas wilayah sebesar $\pm 1.400.000 \text{ km}^2$ dari $2.000.000 \text{ km}^2$ luas wilayah daratan Indonesia.

Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk masih sangat kurang, dimana hingga tahun 2010 jumlah penduduk di Kawasan Timur Indonesia sebesar 36.550.800 jiwa penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk 26,12 per Km².

Ini artinya dengan jumlah penduduk yang diikuti peningkatan kualitas penduduk, bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jones (1995) dalam suatu studi tentang pengujian *time series* pada model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Rajagukguk (2010) bahwa pandangan yang mengemuka selama ini adalah pertumbuhan penduduk berbanding negatif dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal itu salah. Karena masih ada indikasi yang lain, yaitu berhubungan dengan anak usia sekolah yang selanjutnya bekerja.

Angka Partisipasi Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien angka partisipasi sekolah adalah positif sebesar 0,0443 dan signifikan pada derajat kepercayaan 99 persen (α , 1%). Hasil temuan ini membuktikan bahwa angka partisipasi sekolah menjadi salah satu faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Sebagai salah satu tolok ukur pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, adalah angka partisipasi sekolah terus menunjukkan peningkatan di Kawasan Timur Indonesia dari 35,94 persen pada tahun 2001 menjadi 55,28 persen pada tahun 2010 atau rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0,05 persen. Akibat kenaikan angka partisipasi sekolah (APS) tersebut, sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kecenderungan kenaikan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata per tahun sebesar 0,16 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikonfirmasi bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien dari variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar negatif 0,000349.

Jika dilihat dari nilai koefisien tersebut masih dikategorikan cukup rendah. Namun hasil ini belum cukup signifikan untuk membuktikan bahwa dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional karena nilai probabilitasnya tidak signifikan pada α , 1% dan 5%. Artinya tingkat pengangguran terbuka belum menjadi masalah pembangunan ekonomi daerah secara serius di Kawasan Timur Indonesia. Namun demikian, pemerintah daerah perlu mewaspadai dan mengambil langkah kebijakan yang bisa meredam meningkatnya angka pengangguran terbuka melalui penyediaan lapangan pekerjaan karena ada kecenderungan terjadi peningkatan yang bisa mempengaruhi pergerakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini juga dikonfirmasi dan dibuktikan oleh adanya kecenderungan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka rata-rata per tahun sebesar 0,04 persen selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

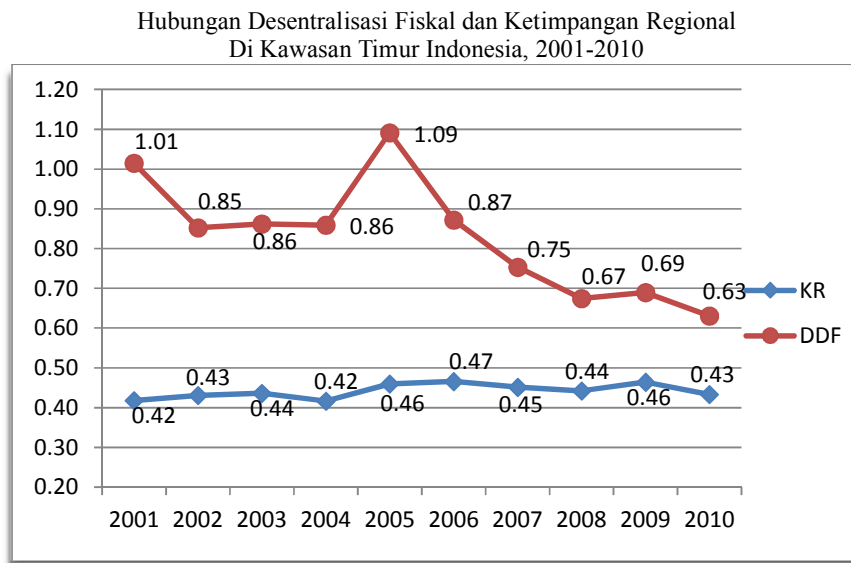
Tingkat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini dibuktikan oleh nilai koefisien tingkat investasi adalah sebesar 1,184056.

Hubungan positif tersebut, juga dikonfirmasi oleh adanya pergerakan positif dari tingkat investasi riil dalam sepuluh tahun terakhir yakni dari 0,18 persen pada tahun 2001 menjadi 0,21 persen pada tahun 2010 atau rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0,18 persen. Nilai yang diperoleh tersebut, jika dilihat relatif rendah, bahkan pada daerah atau provinsi tertentu (misalnya provinsi Maluku Utara dan Gorontalo) tingkat investasi riilnya minus. Ini artinya bahwa investasi yang diharapkan bisa dijadikan indikator utama penciptaan pertumbuhan ekonomi belum bisa berbuat lebih banyak. Salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan rendah tingkat investasi di Kawasan Timur Indonesia baik dari pihak pemerintah daerah sendiri, maupun dari pihak swasta.

Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Regional

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan regional memiliki hubungan negatif yakni sebesar minus 0,024790. Meskipun desentralisasi fiskal bisa mengurangi ketimpangan regional, namun hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan.



Sumber: Diolah dari BPS, 2001-2010

Gambar di atas memperlihatkan hubungan kedua variabel tidak konsisten. Tahun 2001-2003 ketika dana desentralisasi fiskal cenderung turun mengakibatkan ketimpangan cenderung meningkat. Kemudian tahun 2004-2005 dana desentralisasi fiskal meningkat lagi, tetapi ketimpangan cenderung meningkat. Selanjutnya antara 2006-2010, dana desentralisasi fiskal terus menunjukkan penurunan. Sedangkan tingkat ketimpangan relatif lebih stabil dengan kecenderungan meningkat. Karena itu pemerintah daerah perlu hati-hati dan dibutuhkan perhatian khusus terhadap gejala tersebut.

Penyebab lemahnya hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan regional, diindikasikan karena beberapa faktor. *Pertama*, alokasi dana desentralisasi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar fiskal daerah karena relatif rendah. *Kedua*, alokasi pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran atau *inefficiency* dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. Misalnya belanja modal yang diharapkan bisa membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, tetapi lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau bersifat konsumtif. *Ketiga*, sistem administrasi dan kelembagaan ekonomi yang kurang mendukung dan tertata secara baik, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonomi.

Pengaruh Variabel Kontrol Ketimpangan Regional Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional

Dengan bertitik tolak dari pandangan Kuznets bahwa pada tahap awal pembangunan (pembangunan jangka pendek) akan menimbulkan ketimpangan, namun setelah melalui proses pembangunan dalam jangka panjang (sampai titik tertentu) akan terjadi penurunan ketimpangan. Ini artinya dalam model hipotesis U-terbalik yang dikembangkan Kuznets terdapat dua tahapan proses pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bangsa.

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Meningkat

Pada tahapan ini, kegiatan perekonomian daerah terus menunjukkan perubahan dan atau peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi daerah tersebut, juga diikuti dengan peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan per kapita.

Mekanisme yang terjadi pada *phenomena* Kuznets pertama ini bermula dari transfer yang berasal sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Setiap daerah atau provinsi berusaha memperbaiki produktivitas tenaga kerja yang rendah dengan cara mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian dengan menggunakan model pertama dapat dikonfirmasi bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi regional (PER) adalah positif sebesar 0,105400 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (α , 1%). Nilai koefisien ini mengandung makna bahwa ketika pertumbuhan ekonomi regional mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan regional sebesar 0,105400 atau sebesar 0,11 persen.

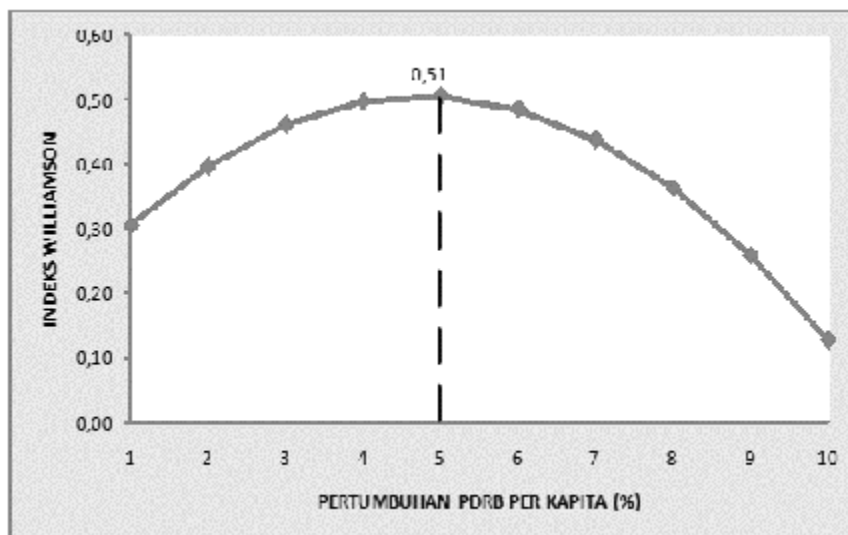
2) Pertumbuhan Ekonomi meningkat dan Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Menurun

Tahapan ke dua ini, proses pembangunan ekonomi telah mengalami pergeseran dari struktur perekonomian tradisional ke perekonomian modern yang ditandai dengan perubahan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berakibat menurunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan kedua model ketimpangan regional tersebut, jika dilakukan penggabungan kedua model berdasarkan tabel hasil model ketimpangan regional dengan asumsi untuk $\alpha = 0,01$ dan $\beta = 0,01$, maka diperoleh model persamaan;

$$Y = 0,3058 + 0,1054 X - 0,0139 X^2$$

Selanjutnya, jika digambar akan tampak pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Regional

Jumlah penduduk di Kawasan Timur Indonesia sampai dengan tahun 2010 berjumlah 36.550.800 juta, jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan 14.000 km², maka Kawasan Timur Indonesia dikategorikan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif rendah atau sedikit sehingga sangat mempengaruhi kemajuan dan atau pembangunan ekonomi daerah yang akhirnya bisa menimbulkan ketimpangan antar daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan negatif dengan ketimpangan regional. Namun demikian hubungan tersebut belum bisa dijadikan dasar pertimbangan karena dalam pengujian signifikansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada α , 5%. Penduduk selain terkait dengan kuantitas, namun yang lebih penting adalah berhubungan dengan kualitas penduduk yakni tingkat pendidikan atau keterampilan. Hal ini yang menyebabkan hubungannya tidak signifikan.

Angka Partisipasi Sekolah dan Ketimpangan Regional

Munculnya ketimpangan dalam pembangunan, salah faktornya adalah rendahnya investasi dibidang sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia ini bisa terlihat dari angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif yang bisa meningkatkan ketimpangan regional.

Kebutuhan dan tuntutan akan pentingnya pendidikan di era globalisasi dan transformasi teknologi yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang ini adalah mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar terjadinya ketimpangan karena semakin besar *unit cost* yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tingkat pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Artinya masyarakat yang memiliki kemampuan sumber daya ekonomi (pendapatan), barSSu bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Sementara masyarakat lain yang tidak memiliki kemampuan sumber daya ekonomi (pendapatan) akan semakin terpinggirkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Regional

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, juga mengurangi tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran serta kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat yang akhirnya mengurangi ketimpangan dalam pembangunan.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan keberlanjutan pembangunan karena bisa menimbulkan ketimpangan regional.

Nilai koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar -0,005 persen tersebut relatif cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengangguran bukan merupakan faktor utama yang bisa memperburuk perekonomian di Kawasan Timur Indonesia karena masih dalam ambang yang bisa ditolelir oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap mengawasi dan memantau pergerakan tingkat pengangguran terbuka karena memiliki peluang munculnya sumber penyakit akut pembangunan setiap saat yang bisa memperburuk perekonomian daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Tingkat Investasi dan Ketimpangan Regional.

Meskipun hubungan kedua variabel tersebut, memiliki hubungan negatif dan signifikan, namun peranannya pada pengurangan ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia relatif rendah seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien tingkat investasi sebesar 0,1394

Rendahnya tingkat investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebegini besar investasi dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman tinggi maka akan mengurangi investor untuk meminjam modal tersebut. *Kedua*, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai cerminan daya beli masyarakat. *Ketiga*, Kondisi sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk melakukan kegiatan investasi. *Keempat*, sistem birokrasi perijinan yang menyulitkan para investor karena terlalu panjang berbelit-belit. *Kelima*, Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengakses perkembangan teknologi terkait kepentingan investasi. *Keenam*, ketidakstabilan politik dan keamanan sangat mempengaruhi para investor untuk melakukan investasi.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi Teoritis

- 1) Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori federalisme fiskal akan lebih efisien dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini karena (1) pemerintah daerah akan merancang sesuai kebutuhannya; (2) rancangan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal; (3) tekanan persaingan *interjurisdictional* memotivasi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan akuntabel.

- 2) Desentralisasi fiskal tidak mampu mengurangi ketimpangan regional. Ketidakmampuan tersebut, diakibatkan oleh keterbatasan dana desentralisasi dan sistem pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran

Implikasi Empirik

- 1) Dana perimbangan sebagai salah satu indikator desentralisasi fiskal memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi ketimpangan regional. Hal ini memberikan implikasi bahwa kebijakan desentralisasi fiskal bisa menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mengurangi ketimpangan regional.
- 2) Ketimpangan antara daerah bisa dikurangi melalui pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan daerah secara efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Good Governance.
- 3) Tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat investasi memiliki efek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo. dan Sakata, M., 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section for the United States, *Journal of Urban Economics*, LII:93-108
- Akai, Nobuo. dan Sakata, M., 2005. *Fiscal Decentralization Commitment and Regional Inequality Evidence from State-Level Cross Section Data for the U.S.*, Faculty of Economic University of Tokyo
- Ananda, Candra Fajri. 2010. *Restorasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Pengalaman Jawa Timur)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Tanggal 30 Desember 2010.
- Bahl, Roy. at al, 2008. The Challenge of Intergovernmental Fiscal Relation in Pakistan: The Property Tax Dimension, *International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies*, Georgia State University International Atlanta, Georgia, 30303 United State of America
- Baskaran, Thushyanthan., and Lars P. Feld, 2009. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?*, CESifo Working Paper No. 2721
- Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, New York
- Bonet, Jaeme, 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience, *JEL Classification H77, O18, R11, R58*
- Davoodi, Hamid and Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth; A Cross-County Study. *Journal of Urban Economics*. (43), 244 – 257
- Jones, Charles I. 1995. Time Series Tests of Endogenous Growth Models, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 2, pp. 495-525
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE Unibraw, Malang
- Nachrowi, Nachrowi D dan Hardius Usman, 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika: Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sixth Edition, Pearson International Edition, USA
- Oates, Wallace E., 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, LXVI (2): 237-34
- Oates, Wallace E. 2007. *On The Theory And Practice Of Fiscal Decentralization*. Centro di Ricerca Interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CRIEI) Working Paper No. 1/2007

- Prud'homme, Remy, 1995. The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, Vol. 10 No. 2 Washington
- Rahmawati, Farida. 2008. Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek. Dalam Desentralisasi Ekonomi Indonesia. *Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Editor Yustika, Ahmad Erani. Penerbit Banyumedia Publishing Malang.
- Rajagukguk, Wilson. 2010. Pertumbuhan Penduduk sebagai Faktor Endogen dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Universitas Indonesia (Disertasi). <http://www.okefarid.wordpress.com>, 18 Maret 2012
- Rodríguez-Pose, Andres and Roberto Ezcurra, 2009. *Decentralization Matter for Regional Disparities? A Cross-Country Analysis*, Serc Discussion Paper 25, JEL Classifications: H11, H71, R11
- Rodríguez-Pose, Andres and Roberto Ezcurra .2010. *Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from the OECD Countries*. Spatial Economic Research Centre. Discussion Paper 51
- Tarigan, M. Syamsul, 2003. Fiscal Decentralization and Economic Development: A Cross-Country Empirical Study, *Forum of International Development Studies*, 24 (Aug. 2003), pp, 245 – 271
- Thießen, U. 2003. Fiscal decentralisation and economic growth in high income OECD countries. *Fiscal Studies*. 24(3): 273–274.
- Wibowo, P. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5 No. 1 Hal 55 – 83
- Woller, G.M. and K. Phillips (1998). Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Empirical Investigation. *Journal of Development Studies*. 34, 139–148.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Zhang, T., and H. Zou. 2001. The growth impact of intersectoral and intergovernmental allocation of public expenditure: With applications to China and India. *China Economic Review* 2(1), 58–81.

Lampiran

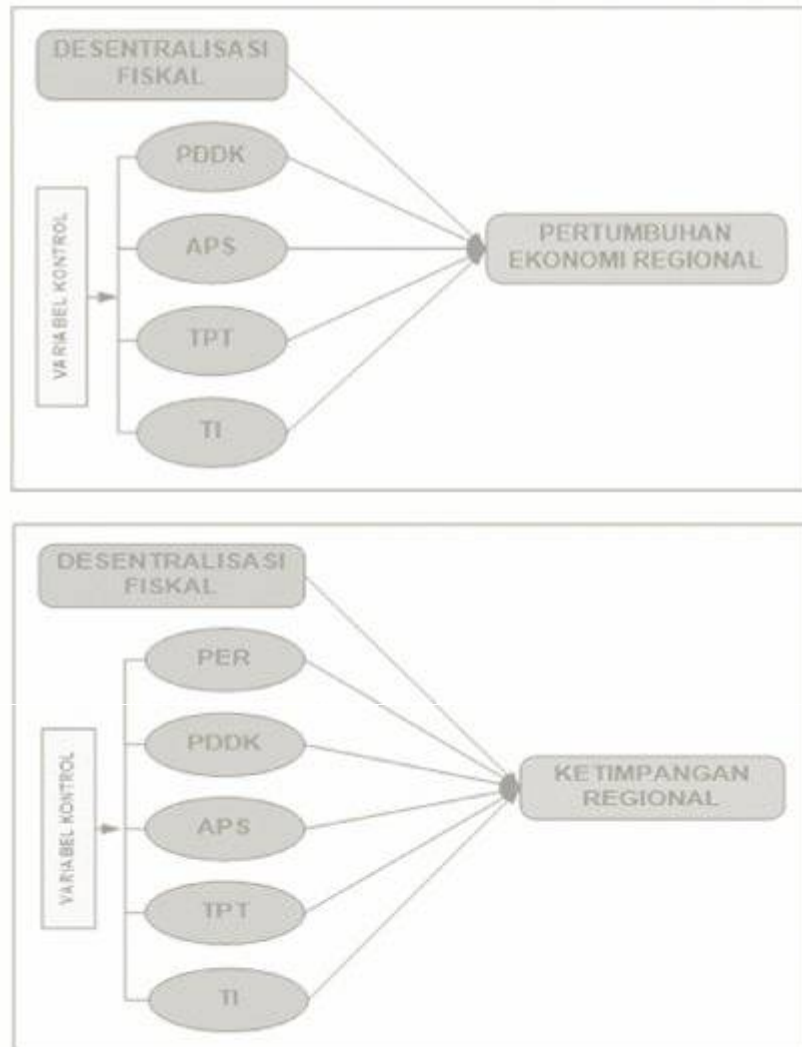
Tabel 1. Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1.113530	0.246913	4.509813	0.0000
DF	3.678830	0.226966	16.20871	0.0000
PDDK	1.868922	0.663922	2.814972	0.0055
APS	0.043783	0.003047	14.36749	0.0000
TPT	-0.000349	0.012967	-0.026949	0.9785
TI	1.184058	0.515427	2.297237	0.0230
Weighted Statistic				
Adjusted R-squared	0,866348			
F-statistic	50,07884			
Prob(F-statistic)	0,000000			
DW	1,5618339			

Tabel 2. Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.305752	0.046991	6.506668	0.0000
DF	-0.024790	0.024040	-1.031194	0.3043
PER	0.105400	0.031962	3.297621	0.0012
(PER) ²	-0.013859	0.004482	-3.091973	0.0024
PDDK	-0.086870	0.076048	-1.142304	0.2553
APS	0.001903	0.000324	5.882753	0.0000
TPT	-0.000471	0.000418	-1.127092	0.2617
TI	-0.139412	0.023607	-5.905636	0.0000

Weighted Statistic	
Adjusted R-squared	0,937922
F-statistic	110,1950
Prob(F-statistic)	0,000000
DW	1,207855



Gambar 1. Kerangka Pikir

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran variabel
1.	Pertumbuhan Ekonomi Regional (PER)	Persentase pertumbuhan PDRB harga konstan dari waktu ke waktu
2.	Ketimpangan Regional (KR)	Ketimpangan PDRB harga konstan antar kabupaten/kota dalam provinsi dengan metode Indeks Williamson
4.	Penduduk (PDDK)	Pertumbuhan penduduk provinsi

		(%) per tahun
5.	Tingkat Pendidikan (PDN)	Angka Partisipasi Sekolah (%) per tahun
6.	Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%) per tahun
7.	Tingkat Investasi (TI)	Rasio investasi terhadap PDRB provinsi per tahun
8.	Desentralisasi Fiskal (FD)	Rasio Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) terhadap total Belanja Daerah per tahun